

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Jombang Jawa Timur

Abstract

Aris Dwi Septian¹
Asyarurahim²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Jombang, email: arisseptian7@staiat-tahdzib.ac.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Jombang, email: asyarurahim@staiat-tahdzib.ac.id

This study aims to analyze: 1) the rate of economic growth and minimum wage in Jombang Regency; 2) the development of poverty in Jombang Regency; 3) the effect of economic growth and minimum wage on poverty in Jombang Regency. The data used in this study are secondary data for the period 2015 - 2022. Data analysis tools using multiple linear regression methods. Based on the results of the analysis, it is known that: 1) The average economic growth of Jombang Regency in the 2015-2022 period was -49%, the growth of the minimum wage of Jombang Regency was 7% and the growth of the poor population was -2% percent; 2) simultaneously economic growth and minimum wages have a significant effect on poverty in Jombang Regency, while partially the variable that has a significant effect on poverty is Economic Growth.

Keywords: Economic Growth, Minimum Wage, Poverty

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Maka tujuan pembangunan adalah mengurangi kemiskinan yang bisa dicapai melalui pertumbuhan ekonomi¹. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara². Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di berbagai daerah syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan³.

Menurut BPS Upah minimum adalah upah terendah (termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur) yang dibayarkan kepada karyawan per jenis jabatan/pekerjaan. Upah minimum merupakan penerimaan bulanan minimum yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Pemerintah menetapkan upah minimum untuk mencegah eksploitasi terhadap pekerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan upah yang memenuhi kebutuhan hidup layak⁴. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum didefinisikan sebagai "upah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

¹ (Kakwani dalam Purnomo & Istiqomah, 2019)

² Ahmad Ma'ruf and Latri Wihastuti, 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya', *Economics*, 9.1 (2008), 44–55 <<https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>>.

³ Syahrur Romi and Etik Umiyati, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi', *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7.1 (2018), 1–7.

⁴ Devanto Shasta Pratomo and Putu Mahardika Adi Saputra, '108-Article Text-242-1-10-20120516', *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5 (2011), 269–84.

setiap pekerja/buruh yang bekerja pada suatu jenis pekerjaan tertentu di suatu wilayah tertentu. Upah minimum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja/buruh menerima imbalan yang layak atas pekerjaan yang mereka lakukan, serta untuk mencegah pengusaha membayar upah di bawah standar yang ditetapkan. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Penetapan upah minimum di setiap daerah bertujuan untuk menyetarakan standar upah, namun kebijakan ini masih dihadapkan pada ketidakseragaman di berbagai wilayah, sektor, dan jenis usaha, serta belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia⁵ Upah minimum provinsi terdiri dari upah pokok dan tunjangan, dan penetapannya didasarkan pada kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, serta kondisi pasar tenaga kerja⁶ Selain itu, peningkatan produktivitas pekerja juga dianggap sebagai faktor penting dalam penetapan upah minimum. upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Penetapan upah minimum harus memperhatikan kebutuhan hidup buruh agar dapat hidup layak ditengah masyarakat dan sosialnya.

Menurut Perry (2006) kemiskinan adalah subjek topikal dan karenanya harus menjadi fokus utama program sosial dan pengembangan di masa depan. Ketenagakerjaan adalah salah satu saluran utama di mana pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan⁷. Diakui bahwa penciptaan lapangan kerja adalah salah satu cara paling berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan menurut Sheng (2001) berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki tiga aspek yang saling terkait, yaitu: "Penghasilan kemiskinan", "kemiskinan akses", dan "kemiskinan kekuasaan". Menurutnya, penurunan "angka kemiskinan" bisa saja terjadi secara berkelanjutan, jika ada masyarakat miskin yang memulai dan mempertahankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan⁸. Kemiskinan tidak secara sistematis terkait dengan pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketidaksetaraan dalam perekonomian. Penjelasan ini bergantung pada hubungan mekanis antara pertumbuhan, ketimpangan dan kemiskinan⁹.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada tahun 2015 adalah 133.750 orang, tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang menjadi 133.320 orang tidak mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang menjadi 131.160 orang mengalami penurunan sebesar -2% persen, tahun 2018 menjadi 120.190 orang mengalami penurunan yang signifikan sebesar -8% persen, tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Jombang mengalami penurunan sebesar -3% persen menjadi 116.440 orang, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang meningkat lagi sebesar 8% persen menjadi 125.940

⁵ Rastri Paramita, 'Menilik Upah Minimum Dan Ketimpangan', *Jurnal Budget*, 6.2 (2021), 184–200.

⁶ FILMA Ramadhani, 'Oleh : FILMA RAMADHANI', *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Utama Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019*, 2020.

⁷ Hasna Khemili and Mounir Belloumi, 'Social Security and Fighting Poverty in Tunisia', *Economies*, 6.1 (2018), 1–17 <<https://doi.org/10.3390/economies6010012>>.

⁸ Sa Yuliana and others, 'The Linkage of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatra, Indonesia: In an Islamic Perspective', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7.4 (2017), 237–43.

⁹ (Bourguign on dalam Guiga & Rejeb, 2012)

orang. Rata-rata jumlah penduduk miskin Kabupaten Jombang tahun 2015 sampai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -2% persen (BPS, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (times series) selama 7 tahun dari tahun 2015-2022, mencakup pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang, upah minimum Kabupaten Jombang dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Jombang. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMP terhadap kemiskinan digunakan alat analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan
- a = Konstanta
- x1 = Pertumbuhan Ekonomi
- x2 = Upah Minimum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang periode tahun 2015-2022 rata-rata menurun sebesar -49% persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang selama periode analisis cenderung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	Perkembangan %
2015	5,36	-
2016	5,40	1%
2017	5,36	-1%
2018	5,29	-1%
2019	5,10	-4%
2020	-1,98	-139%
2021	3,24	-264%
2022	5,37	66%
	Rata-rata	-49%

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi ADHK di Kabupaten Jombang Periode 2015-2022

Dari tabel 1. dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Jombang penurunan yang signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 264% persen, hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi virus corona yang menyebabkan sektor perekonomian lumpuh total selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 66 persen, hal ini ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan perekonomian yang mulai membaik, banyaknya UMKM dan aktivitas masyarakat yang sudah tidak dibatasi lagi karena adanya wabah pandemi corona

Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Jombang selama periode 2015-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:.

Tahun	Upah minimum	Perkembangan %
2015	1 725 000,00	-
2016	1 924 000,00	12%
2017	2 082 730,00	8%
2018	2 264 135,78	9%
2019	2 445 945,88	8%
2020	2 794 801,59	14%
2021	2 654 095,88	-5%
2022	2 654 095,88	0%
Rata-rata		7%

Tabel 2. Upah Minimum di Kabupaten Jombang Periode 2015-2022

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat bahwa tahun 2020 upah minimum Kabupaten Jombang mengalami peningkatan tertinggi selama periode analisis yaitu sebesar 14 persen. Sedangkan peningkatan upah minimum Kabupaten Jombang yang terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar -5 persen.

Penduduk Miskin

Rata-rata jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2022 menurun sebesar -2% per tahun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang selama periode analisis cenderung naik turun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tahun	Kemiskinan	Perkembangan %
2015	133,75	-
2016	133,32	0%
2017	131,16	-2%
2018	120,19	-8%
2019	116,44	-3%
2020	125,94	8%
2021	127,30	1%
2022	115,48	-9%
Rata-rata		-2%

Tabel 3. Kemiskinan di Kabupaten Jombang Periode 2015-2022

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 8% hal ini terjadi karena adanya wabah pandemi covid yang menyebabkan sektor perekonomian lumpuh secara serentak (ini merupakan peningkatan yang tertinggi selama periode analisis), namun pada tahun selanjutnya pada 2022 kemiskinan mengalami penurunan sebanyak -9% hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Jombang mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan, akibat dari wabah pandemi covid yang berakhir sehingga perekonomian berjalan kembali.

Hasil Hitung

Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

Variabel	Coefisien	Std Error	T	Sig
Constant	8.709			
Pertumbuhan Ekonomi	2.708	369	7.347	.001
Upah Minimum	-250	.198	-1.262	.263
	R ²		F	
	.882		27.170	.002

Sumber: data diolah, 2023

Dari hasil perhitungan didapat nilai Fhitung sebesar 27,170 (Sig.001). Artinya secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2023. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dari hasil analisis diperoleh besarnya koefisien determinasi adalah 0,882. Nilai 0,882, artinya secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan upah minimum mampu menjelaskan kemiskinan sebesar 88.2 persen, sedangkan sisanya sebesar 11.8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara parsial terhadap variabel kemiskinan. Dari hasil penelitian diperoleh variabel pertumbuhan ekonomi (PE) didapat nilai thitung sebesar 7.347 dengan Sig.=.001 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,5$. Artinya secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang. Pada variabel upah minimum didapat nilai t-hitung sebesar -1,262 dengan Sig.=.263, yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya secara parsial upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang periode 2015-2022 sebesar -49 persen, dan rata-rata perkembangan Upah Minimum periode 2015-2022 sebesar 7 persen. Rata-rata perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Jombang periode 2015-2022 sebesar -2 persen. Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jombang, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah Pertumbuhan ekonomi.

Saran

Pemerintah Kabupaten Jombang agar terus mempertahankan dan meningkatkan lagi Program untuk mengurangi problematika kemiskinan ini, antara lain dengan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan landasan agar daerah tersebut lebih maju dan memiliki daya saing yang lebih kuat. pemantapan potensi ekonomi lokal perlu diperkuat lagi melihat perkembangan sistem ekonomi sekarang yang lebih maju dan modern. Sehingga berdampak untuk mengurangi ketergantungan dan menstimulus perekonomian yang lebih maju, Di sisi lain, pemerintah daerah agar

lebih memperhatikan pendapatan dari pekerja, sangat penting pemerintah daerah untuk bisa menambah jumlah lapangan kerja, serta memperkuat usaha UMKM tempat masyarakat lebih dominan bekerja. pemerintah perlu lebih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur terutama di pedesaan untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga akan menciptakan pendapat yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Guiga, Housseima, and Jaleddine Ben Rejeb, 'Poverty, Growth and Inequality in Developing Countries', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2.4 (2012), 470–79
- Khemili, Hasna, and Mounir Belloumi, 'Social Security and Fighting Poverty in Tunisia', *Economies*, 6.1 (2018), 1–17 <<https://doi.org/10.3390/economies6010012>>
- Ma'ruf, Ahmad, and Latri Wihastuti, 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya', *Economics*, 9.1 (2008), 44–55 <<https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>>
- Paramita, Rastri, 'Menilik Upah Minimum Dan Ketimpangan', *Jurnal Budget*, 6.2 (2021), 184–200
- Pratomo, Devanto Shasta, and Putu Mahardika Adi Saputra, '108-Article Text-242-1-10-20120516', *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5 (2011), 269–84
- Purnomo, Sodik Dwi, and Istiqomah Istiqomah, 'Economic Growth and Poverty: The Mediating Effect of Employment', *Jejak*, 12.1 (2019), 238–52 <<https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18591>>
- Ramadhani, FILMA, 'Oleh : FILMA RAMADHANI', *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Utama Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019*, 2020
- Romi, Syahrur, and Etik Umiyati, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi', *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7.1 (2018), 1–7
- Yuliana, Sa, Anna Yulianita, Nurlina T Muhyiddin, and Abdul Bashir, 'The Linkage of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatra, Indonesia: In an Islamic Perspective', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7.4 (2017), 237–43